

Analisis Pedagogi Kritis Paulo Freire dalam Pro Kontra Penghapusan Ujian Nasional pada Kurikulum Merdeka Belajar

Dwi Astutik ^{1a(*)}

¹Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

^a dwiastutik@staff.uns.ac.id

(*) Corresponding Author
dwiastutik@staff.uns.ac.id

How to Cite: Dwi Astutik. (2024). Analisis Pedagogi Kritis Paulo Freire dalam Pro Kontra Penghapusan Ujian Nasional pada Kurikulum Merdeka Belajar [doi: 10.36526/js.v3i2.4820](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4820)

Received : 12-10-2024
Revised : 11-11-2024
Accepted : 30-11-2024

Keywords:

Asesmen Kompetensi Minimum,
Paulo Freire,
Humanisme

Abstract

Implementasi penghapusan Ujian Nasional dalam kurikulum Merdeka Belajar memunculkan pro dan kontra di kalangan pendidik pada umumnya. Meskipun terdapat hal-hal kontra dalam penerapannya, akan tetapi implementasi penghapusan Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) memiliki cita-cita berkaitan dengan pemberian kemerdekaan dan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengelola evaluasi yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di salah satu sekolah Kota Surakarta dengan perspektif Paulo Freire. Melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam dan observasi, diperoleh data bahwa implementasi selama ini menghasilkan pandangan pro dan kontra di kalangan akademik. Penulisan artikel ini akan lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang pro pada implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah. Jika selama ini evaluasi pendidikan hanya ditentukan oleh Ujian Nasional dengan beberapa mata Pelajaran saja, penghapusan ini harapannya akan memberikan sisi humanis dimana kemampuan anak sejatinya tidak hanya dalam kognitif saja tetapi ada aspek lain yakni afektif dan psikomotorik. Sejalan dengan perspektif Paulo Freire yang menyampaikan bahwa pembelajaran di kelas bukan sekedar mendengarkan, tapi berdiskusi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajar di kelas. Pertimbangkan sebuah proyek sosial yang melibatkan seluruh kelas. Pemikiran Freire tentang refleksi dan tindakan sejalan dengan arah konseptual pendidikan yang digagas pemerintah saat ini, bahwa guru dan siswa perlu terlibat dalam proses refleksi selama pembelajaran.

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan harkat dan martabat untuk menjadi manusia seutuhnya. Melalui pendidikan individu didorong untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan pendidikan di negara ini, pengendalian mutu menjadi sangat penting untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih fokus, efektif, relevan dan dinamis (Putra & Roni, 2021; Siahaan et al., 2023). Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam Pembangunan pendidikan adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, tidak heran kiranya banyak ditemukan kebijakan dan hasil penelitian yang berfokus pada pembelajaran. Proses pembelajaran penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, oleh karena itu, kegiatan penilaian pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai berdasarkan kesesuaian instrumen pengukuran evaluasi dan tentunya tujuannya dapat diukur (Sari et al., 2021).

Sejak kurikulum Merdeka belajar dicanangkan, berkaitan dengan hasil penilaian dijadikan sebagai indikator yang penting keberhasilan pembelajaran di suatu sekolah baik bagi guru maupun siswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional secara resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional, dan sebagai gantinya akan dilaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (Kementerian Pendidikan

Dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.). Hal ini senada dengan tulisan dalam sebuah artikel yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan AKM akan dimulai pada tahun 2021 yang mencakup keterampilan literasi (bahasa) dengan penekanan pada kemampuan berpikir dan berhitung (matematika), serta penguatan karakter nilai-nilai Pancasila (Hasanah et al., 2021). Penilaian kompetensi minimum dan survei kepribadian dilaksanakan pada tingkat menengah dan bukan pada tingkat akhir. Hal ini karena penerapan pada tingkat menengah memberikan kesempatan kepada sekolah dan guru untuk meningkatkan siswanya dan menghindari tekanan ujian yang bersifat formatif.

Tidak hanya di Indonesia, di Finlandia juga tidak ada evaluasi dalam tingkat nasional dalam pendidikan wajib 10 tahun yang dicanangkan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Üstün & Eryilmaz, 2018) bahwa tidak ada ujian nasional selama pendidikan wajib sepuluh tahun di Finlandia. Sekolah tidak menyeleksi siswa mereka dalam pendidikan dasar; artinya, siswa tidak dikelompokkan ke dalam sekolah yang berbeda berdasarkan keberhasilan mereka. Selain di Finlandia, Australia juga memiliki kebijakan terkait dengan ujian tingkat nasional tetapi tidak menjadi penentu dalam kelulusan siswanya yang mereka namai dengan *National Assessment Program-Literacy and Numeracy* (NAPLAN). Materi ujian yang diberikan meliputi membaca, menulis, Bahasa (mengeja, tata Bahasa, dan pemberian tanda baca) dan perhitungan. Ujian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mengukur kemampuan anak dalam hal literasi dan numerasi tetapi sekali lagi tidak menentukan tingkat kelulusan. Siswa yang dituju adalah siswa kelas 3, 5, 7, dan 9. Setiap sekolah juga menyelenggarakan ujian, tetapi ujian ini tidak memengaruhi apakah mereka naik ke kelas/tahap berikutnya. Karena peningkatan kelas secara otomatis menyesuaikan usia siswa (Marmoah et al., 2021).

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menyajikan beberapa respon berkaitan dengan Ujian Nasional yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan di Indonesia. Hasil tersebut menyatakan bahwa bahan ajar pada mata pelajaran ujian nasional yang ada dinilai terlalu padat sehingga membuat fokus belajar siswa cenderung menghafal materi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan belajar mandiri. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa. pada dasarnya adalah tujuan ujian nasional sebagai penilaian terhadap sistem pendidikan nasional, namun hanya yang menilai aspek kognitif atau berorientasi kognitif. Penilaian kompetensi minimal ini tidak didasarkan pada penguasaan materi pelajaran, melainkan pada demonstrasi keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan dari survei kepribadian adalah untuk mengetahui bagaimana setiap siswa menerapkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini kemudian diumpamakan kembali ke sekolah untuk membangun lingkungan sekolah berdasarkan prinsip Pancasila (Indahri, 2020).

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bukan didasarkan pada kemampuan penguasaan materi sesuai kurikulum seperti halnya ujian nasional. Asesmen Kompetensi Minimum dimaksudkan untuk mencerminkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuannya bahwa asesmen tersebut dilaksanakan untuk menilai kemampuan membaca dan kemampuan matematika (Rohim, 2021). Argumentasi dan tujuan kebijakan AKM ini ternyata menimbulkan sebuah Pro dan Kontra baik dari pelaku pendidikan maupun siswa. Berdasarkan survei di sekolah menengah atas di Kota Tebing Tinggi ditemukan bahwa sebanyak 4.444 guru atau 22,22% menentang penghapusan ujian nasional karena akan menurunkan motivasi siswa. Lebih lanjut, 77,77% mendukung penghapusan ujian nasional, dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa, dan menyambut baik langkah ini sebagai evaluasi pendidikan yang tepat (Sari et al., 2021). Faktanya, penghapusan ujian nasional dan penggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) belum banyak dipahami oleh guru secara optimal (Novita et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut berdampak pada kinerja guru. Hal ini dikarenakan masih adanya beban psikologis karena tidak adanya tujuan yang ingin dicapai dan siswa belum siap (Putika et al., 2022).

Meskipun kebijakan asesmen ini menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya, patut dihargai bahwa kebijakan asesmen tersebut merupakan salah satu Upaya dalam memerdekakan anak dan mengurangi beban belajar yang berat. Hal ini sejalan dengan gagasan pedagogi kritis bahwa

idealnya pendidikan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melalui proses pendidikan dengan cara yang humanis. Setidaknya, dengan penghapusan nomenklatur dan pelaksanaan Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum memiliki dampak positif terkait hilangnya dikotomi antara mapel UN dan non-UN. Selain itu, tidak ada lagi fenomena percepatan dalam pemberian materi yang seharusnya diselesaikan di semester 6 untuk diselesaikan di semester 5. Bagi siswa yang memiliki keterbatasan biaya, tidak ada lagi bimbingan di luar jam sekolah, termasuk di dalamnya Survey Karakter dilakukan sesuai dengan data kognitif dan kondisi ekosistem sekolah untuk bisa diberikan umpan balik dalam melakukan perubahan pendidikan. Setidaknya, guru sedikit merasakan kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan penilaian (Teresia, 2021).

Menurut Freire, landasan terpenting dalam diri manusia adalah kemampuan mengendalikan diri melalui kebebasan, melakukan apa pun sesuai pilihannya, terutama dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi (Fauziati et al., 2022). Dengan dihapuskannya ujian nasional digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter, maka siswa terbebas dari beban evaluasi pendidikan yang hanya bersifat kognitif saja. Jika dicermati lebih dalam dan kritis, program "kebebasan belajar" ini nampaknya mirip dengan konsep pendidikan gratis yang dikemukakan oleh filsuf pendidikan Paulo Freire. Konsep pendidikan yang ditawarkan Freire merupakan alternatif pemecahan masalah untuk memerangi pelatihan perbankan. Metode pemecahan masalah lebih menekankan pada proses dialogis. Bagi Freire, pendidikan emansipatoris adalah pendidikan yang mengedepankan kesadaran kritis transitif. Hal ini ditandai dengan kedalaman penafsiran persoalan, keyakinan dalam argumentasi, dan kemampuan menerima dan menolak (Fauziati et al., 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk menggali dan menyajikan data penelitian yang telah diperoleh secara lebih mendalam, dan memungkinkan peneliti untuk lebih memahami subjek penelitian secara alamiah. Jenis penelitian deskriptif naratif dipilih oleh penulis untuk menyajikan gambaran berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh secara mendalam dan bermakna. Penggalan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi secara non-partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang sudah terpilih melalui purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditetapkan yakni guru yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar di kelasnya, termasuk siswa yang sudah memperoleh pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Sedangkan observasi secara pasif dilakukan untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas dan bagaimana implementasi Asesmen Kompetensi Minimum dilaksanakan. Setelah data terkumpul, Langkah selanjutnya adalah pencapaian validitas data yang dilakukan melalui triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan tidak hanya berpijak pada hasil wawancara saja, akan tetapi peneliti juga membandingkan data hasil observasi untuk menguatkan temuan di lapangan. Selanjutnya adalah langkah terakhir berupa analisis hasil penelitian yang dimulai dari penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Guru dan Dampak Penghapusan Ujian Nasional di Tingkat Mikro (Sekolah)

Revolusi industry yang sudah memasuki revolusi industry 5.0 mendorong semua elemen untuk terus mengupayakan kemajuan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, salah satu yang dijadikan sebagai sebuah upaya memajukan pendidikan adalah kebijakan pada kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Esensi tersebut adalah mengembalikan system pendidikan nasional kepada undang-undang untuk memberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka. Artinya, Merdeka belajar bertujuan untuk memberikan otonomi kepada Lembaga

pendidikan dengan memilih mana yang disukai dan akan dikembangkan (*GTK Kemendikbud | 2023, n.d.*)

Merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, dimana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional (Dharma et al., 2021). Implementasi Merdeka belajar diluncurkan dengan mencanangkan empat program Merdeka belajar. Keempat program Merdeka belajar tersebut yakni komitmen pada pembelajaran dasar, dukungan terhadap keterampilan mengajar, menargetkan kelompok tertentu dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan dan mempercepat kemajuan. Di antara ke empat aspek tersebut, pemerintah memulai dengan menetapkan penilaian nasional sebagai wujud dari pelaksanaan prioritas utama yang dikenalkan dengan Asesmen Nasional dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, n.d.-b)

Asesmen Nasional yang dulu dikenal dengan Ujian Nasional atau UN sebagai kegiatan mengukur capaian kompetensi lulusan pada suatu mata pelajaran tertentu dalam ruang lingkup nasional yang berlandaskan pada standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Permendikbud No.43 Tahun 2019, adanya ujian nasional bertujuan untuk menilai suatu capaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang telah ditentukan. Hingga pada akhirnya adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Program Merdeka belajar salah satunya penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digantikan dengan Asesmen Nasional yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar (Hasanah et al., 2021b). Asesmen tersebut untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam bernalar menggunakan bahasa atau literasi dan menggunakan matematika atau numerasi serta penguatan pendidikan karakter.

Penghapusan UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) menggunakan standarisasi ujian yang mengacu pada level internasional. Hal ini sejalan dengan keputusan Indonesia untuk turut serta dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* (Teresia, 2021). Penilaian tersebut termuat dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* namun berbasis pada kearifan lokal yang ada khususnya dalam penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan berfokus pada dua bagian penting yaitu literasi dan numerasi. Literasi menjadi tujuan penting dalam upaya perbaikan evaluasi sistem pendidikan Indonesia, yang mana bukan hanya berfokus pada kemampuan untuk membaca namun menganalisa suatu bacaan sehingga mampu memahami konsep yang ada dalam tulisan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan Program Merdeka Belajar khususnya penghapusan UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) diharapkan setiap sekolah dapat menentukan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta nilai setiap daerahnya.

Terkait dengan sistem penghapusan UN tersebut informan terpilih dalam penelitian ini cenderung pro terhadap kebijakan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan, menurut beliau adanya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) menjadikan bahan evaluasi yang baru khususnya bagi pendidikan nasional. Melalui kebijakan tersebut setiap sekolah memiliki rapor sekolah melalui AKM. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Fauziati et al., 2022) adanya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) menjadi representasi rapor sekolah itu sendiri bukan setiap peserta didik. Adanya rapor tersebut, menunjukkan sejauh mana pencapaian sekolah dalam setiap proses pendidikan yang dilakukan. Hal tersebut mampu memunculkan kesadaran setiap komponen yang ada di sekolah untuk terlibat aktif dalam pencarian solusi permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian, disisi lain beliau juga menyampaikan adanya kebijakan tersebut menjadikan tantangan tersendiri khususnya bagi para guru. Dalam hal ini guru juga dituntut untuk dapat membuat soal-soal yang telah disesuaikan dengan standar soal berbasis Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK).

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) tentu membutuhkan bantuan dari setiap *stakeholder* untuk keberhasilan Program Merdeka Belajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pasalnya, Asesmen Nasional merupakan hal baru bagi setiap pihak, sehingga dibutuhkan sebuah kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, simulasi soal, dan konsep soal yang akan didistribusikan. Ditambah lagi dengan konsep penilaian berbasis pada penggunaan daya nalar berbasis bahasa (literasi) dan angka (numerasi), kedua kemampuan dasar ini harus dikuasai oleh peserta didik. Instrumen soal AKM tidak hanya berisi topik ataupun konten materi namun beberapa komponen seperti konten, konteks dan proses kognitif yang semestinya dilakukan oleh peserta didik, hal inilah yang menjadi kesulitan dalam pembuatan soal (Novita et al., 2021).

Selain keuntungan yang diperoleh dalam implementasi Asesmen Kompetensi Minimum, juga tidak dipungkiri bahwa beberapa guru juga merasakan kehilangan pada salah satu bagian yang sudah mengakar kuat salah satunya Ujian Nasional. Tidak hanya pada level guru, dalam proses pembelajaran, dengan adanya kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) juga dapat berpengaruh pada intensitas mengajar guru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hal ini disebabkan karena jam mata pelajaran di sekolah mengalami pengurangan khususnya di kelas X, karena belum adanya penjurusan sehingga mereka menerima mata pelajaran baik dari jurusan IPA maupun IPS. Sekolah juga pada akhirnya tidak sering memberikan pekerjaan rumah, dikarenakan penerapan kurikulum merdeka bagi siswa itu kerap diberikan proyek. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Echa Safitri et al., 2024) di MAN 2 Kulon Progo menyebutkan bahwa Ujian Nasional sebagai penilaian akhir proses pembelajaran melalui serangkaian analisis hingga menafsirkan data sehingga mendapatkan data ataupun informasi proses belajar mengajar yang telah berlangsung. Namun, adanya penghapusan ini menjadikan penghapusan proses yang dianggap tidak berfungsi khususnya bagi kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) membutuhkan persiapan yang matang dan upaya guru seperti mengikuti pelatihan seperti sosialisasi, bimtek, dan diklat (Patimah et al., 2023)

Dalam penelitian (Sari et al., 2021) menyebutkan bahwa adanya kebijakan tersebut dinilai tepat karena penghapusan Ujian Nasional akan menghilangkan beban peserta didik. Materi UN terlalu padat sehingga fokus belajar cenderung menghafal materi (*cognitive oriented*) sehingga memunculkan beban psikologis pada peserta didik. Namun dalam penerapan di SMA 2 Batik Surakarta menunjukan fakta yang berbeda. Hal ini menunjukan esensi dari penghapusan Ujian Nasional (UN) sendiri bertujuan untuk menghilangkan beban psikologis bagi siswa, namun kenyataan beban yang diterima siswa semakin berat. Kondisi peserta didik yang belum mampu menerapkan budaya membaca baik dari literasi ataupun numerik ini justru membuat kondisi semakin tidak stabil. Namun disisi lain sebenarnya siswa memiliki tantangan tersendiri untuk *survive* berkaitan dengan hal hal baru melalui penghapusan UN seperti memberikan ruang bagi siswa untuk melatih berpikir kritis. Hal tersebut menunjukan penerapan kebijakan Program Merdeka Belajar khususnya penghapusan UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter (SK) masih belum maksimal, dimana kebijakan tersebut mengharuskan setiap guru maupun peserta didik untuk dapat beradaptasi secara bertahap agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Sejalan dengan konsep pendidikan yang membebaskan dari Paulo Freire, permasalahan UN sudah ada sejak lama karena dinilai memberatkan peserta didik, tidak hanya itu evaluasi yang dilakukan hanya cenderung pada tingkat kemampuan menghafal individu saja. Adanya kebijakan Program Merdeka Belajar sebagai upaya dalam membebaskan individu dalam segala bentuk ketertindasan yang dialami (Fauziati et al., 2022). Freire mengemukakan bahwa pendidikan harus berpusat pada hakikat menjadi manusia seutuhnya atau proses humanisasi. Adanya konsep dasar manusia adalah penguasaan atas dirinya sendiri untuk menjadi manusia merdeka, artian bebas ini ialah mampu melakukan apapun sesuai dengan pilihannya sendiri dan kebebasan berpikir, berkreasi serta berinovasi (Freire, 2007).

Pendidikan Kritis Paulo Freire dan Penghapusan UN sebagai Bentuk Humanisasi Pendidikan

Ide pendidikan emansipatoris tidak terlepas dari sosok Paulo Freire. Pendidikan emansipatoris merupakan upaya untuk membebaskan individu dari segala bentuk penindasan. Menurut Freire, penindasan berarti eksploitasi obyektif terhadap orang A oleh orang B. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penindasan adalah segala bentuk upaya penguasa yang karena faktor modalnya yang unggul mampu melakukan penindasan yang secara tidak langsung berujung pada eksploitasi guna mempertahankan kekuasaannya. Menurut Freire, inilah yang disebut dehumanisasi, yaitu menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan sebagai akibat dari penindasan struktural yang tidak adil (Freire, 2007).

Pendidikan sebagai praktik kebebasan dalam pendidikan untuk kesadaran kritis, Freire berpendapat bahwa pendidikan pada tingkat ini bukan tentang domestikasi sosial (domestikasi), seperti yang terjadi di dunia Ketiga, tetapi tentang emansipasi (yang sering terjadi di negara-negara seperti Brazil), artinya pendidikan seringkali dijadikan alat untuk melegitimasi kehendak penguasa terhadap mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi aksi dan refleksi komprehensif untuk mentransformasikan realitas yang menindas menuju pembebasan (Cooper & Majumdar, 2023; Freire, 1970; Syaikhudin, 2012).

Dalam beberapa karyanya yang lain, Freire menggambarkan upayanya untuk membebaskan diri dari berbagai permasalahan. Isunya tidak hanya seputar pendidikan, tapi juga ekonomi, politik, hukum, dan budaya setiap hari. Oleh karena itu, memasukkan realitas sosial ke dalam pendidikan merupakan upaya untuk membebaskan diri dari permasalahan sosial. Menurut Freire, pola menghadapi permasalahan (secara kontekstual) bisa terjadi kapan saja dan dimana saja selama manusia masih hidup (Freire, 1974; Misoczky, 2023; Syaikhudin, 2012).

Munculnya pendidikan yang membebaskan ini bukan tanpa alasan. Freire menyampaikan bahwa pendidikan yang dijalankan selama ini lebih banyak pada bentuk pendidikan gaya bank. Pendidikan gaya bank ini merupakan praktik pendidikan anti-dialog. Freire memberikan kritik yang tajam pada implementasi pendidikan gaya bank ini, karena menurutnya pendidikan seperti itu dapat membatasi ruang gerak guru serta siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas (Freire, 2007).

Freire berpendapat bahwa pendidikan idealnya harus menitikberatkan pada kemanusiaan dan emansipasi sebagai proses humanisasi. Menurut Freire, konsep dasar manusia adalah manusia adalah tuan atas dirinya sendiri, yaitu mandiri dalam arti bebas berbuat apa saja dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi (Fauziati et al., 2022). Freire menggagas pemikiran bahwa pendidikan tidak lain adalah proses humanisme yang mengarah pada kebebasan dari keterbelengguan pendidikan untuk memberikan kebebasan pada anak dan keluar dari budaya bisu.

Implementasi pendidikan gaya bank ini memunculkan kritik pada Freire yang dikenal dengan istilah pendidikan yang berdialog. Pembebasan yang membebaskan menurut Freire fokus pada pemecahan masalah dalam bentuk dialog. Dialog merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh manusia untuk berkomunikasi, yang di dalamnya terdapat cara untuk mencapainya pendapat, gagasan, serta perasaan. Freire menuliskan "manusia dialogis" yang bersifat kritis dan memiliki kekuatan untuk menciptakan mengubah sesuatu hal. Manusia dialogis menurut Freire ini diharapkan dapat melewati masa sulit dengan adanya usaha pembebasan (Freire, 2007). Bagi Freire, model pendidikan ala perbankan bersifat dominan dan mencerminkan masyarakat yang represif secara keseluruhan, di mana asimetri kekuasaan dipertahankan. Dalam model ini, pendidikan bukanlah sistem yang digunakan untuk melawan proses atau struktur yang tidak manusiawi yang merongrong kebebasan. Sebaliknya, pendidikan yang "berbasis perbankan" mereproduksi status quo hegemonik, di mana penindasan diaktualisasikan dalam objektifikasi individu dan kelompok yang rutin dan dianggap netral. Secara historis, pelestarian status quo yang represif, yang bervariasi menurut kondisi sosial-historis dan ekonomi tertentu, berasal dari penggunaan kekuasaan (Barros et al., 2024).

Pertanyaan yang kemudian muncul ketika melihat kebijakan Merdeka belajar ketika dibenturkan dengan penghapusan UN adalah apakah kebijakan tersebut memang benar-benar bentuk dari humanisasi pendidikan. Meskipun pada implementasinya menuai banyak pro kontra dari pelaku pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha tersebut adalah salah satu bentuk upaya dalam humanisasi pendidikan. Hasil riset berupa data bahwa anak banyak yang tertekan secara kognitif dalam mengikuti Ujian Nasional, serta penentuan kelulusan yang hanya ditentukan oleh satu kriteria saja dianggap sebagai bentuk ketidakmenerimaan pendidikan pada kemampuan anak pada sisi selain kognitif. Hasil-hasil penelitian lain yang juga menyatakan bahwa UN mampu menyumbang rasa stress kognitif agaknya juga menjadi salah satu dasar dan alasan penghapusan kebijakan ujian nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang kontra pada implementasi program penghapusan ujian nasional tentu memberikan sumbangan yang berarti dalam kancah evaluasi pelaksanaan kurikulum Merdeka belajar. Akan tetapi jika kita focus pada hasil-hasil penelitian yang mendukung dan optimis pada kurikulum ini dirasa relevan dengan apa yang disampaikan oleh Freire bahwasannya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan tidak memaksa anak untuk belajar sesuai dengan tuntutan ujian nasional adalah salah satu bentuk pendidikan yang lebih humanis.

Solusi selanjutnya adalah dengan mengubah ujian nasional menjadi AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) dan melakukan wawancara kepribadian sebagai syarat penyelesaian. Sebanyak 4.444 sekolah masing-masing mendapat ijazah sekolah dari AKM ini. AKM tidak mewakili seluruh ijazah siswa, melainkan raport sekolah itu sendiri. Se jauh mana dan dalam hal apa sekolah tersebut berhasil? terobosan politik penghapusan ujian nasional ini sejalan dengan konsep emansipasi pendidikan Freire, yaitu gagasan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan rasa partisipasi dalam penyelesaian kehidupan setiap individu. Masalah dalam berpartisipasi. Bukan sekedar menghafal dan meneruskan ilmu. Nadiem Makarim membenarkan penghapusan ujian nasional dan penggantinya dengan AKM, dengan menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak dapat dicapai jika sistem pendidikan hanya berfokus pada hafalan (Fauziati et al., 2022).

Terjadi pergeseran paradigma pendidikan dimana siswa harus mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mendikbud bahwa kreativitas dan kemampuan berkolaborasi lebih penting dalam pendidikan dan tidak diukur hanya dengan tes dan ujian pilihan ganda. Untuk itu para guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di dalam kelas. Ia juga mengatakan, ujian akhir masih ditentukan oleh fakultas dan pemerintah, dan mahasiswa tidak bisa belajar dengan leluasa. Pemerintah tidak bisa menentukan gelar setiap siswa. Jika dianalisis dengan menggunakan konsep pendidikan Freire dalam proses pendidikan khususnya pembelajaran harus menampilkan individu sebagai subjek yang mengedepankan dialog dan diskusi. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini serupa dengan gagasan yang dikemukakan oleh Freire untuk mendobrak sistem perbankan dengan menggunakan cara berbeda dalam mengatasi masalah tersebut. Metode ini lebih bersifat interaktif dan menghadirkan siswa sebagai subjek yang dapat menentukan keinginannya sendiri (Fauziati et al., 2022).

Lebih lanjut lagi disampaikan dalam salah satu kalimat pidatonya, Mendikbud mengajak agar kelas diajak bukan sekedar mendengarkan, tapi berdiskusi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajar di kelas. Pertimbangkan sebuah proyek sosial yang melibatkan seluruh kelas. Pemikiran Freire tentang refleksi dan tindakan sejalan dengan arah konseptual pendidikan yang digagas pemerintah saat ini, bahwa guru dan siswa perlu terlibat dalam proses refleksi selama pembelajaran (Fauziati et al., 2022). Hal ini sejalan dengan komitmen Freire terhadap pembelajaran yang empatik, dialogis, dan partisipatif serta penekanannya pada kesadaran bersama memberikan wawasan pedagogis yang tak lekang oleh waktu. Dengan memupuk pemikiran kritis dan kepenulisan pada mahasiswa dan praktisi manajemen, kita dapat menumbuhkan organisasi (pendidikan) yang menyadari tantangan paling mendesak umat manusia. Ukuran akurat pendidikan yang efektif tidak hanya terletak pada keberhasilan ekonomi

tetapi juga dalam memberdayakan subjek untuk menjadi penulis kehidupan mereka sendiri, dengan mengakui bahwa menjadi manusia berarti hidup di komunitas kita sebagai warga dunia. Freire mengingatkan kita bahwa pengetahuan itu rumit, terkontekstualisasikan, dan diciptakan bersama; dan harus bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan konten tetapi juga untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna yang dapat mengubah realitas (Barros et al., 2024).

PENUTUP

Asesmen nasional dilakukan bertujuan untuk mengubah paradigma evaluasi pendidikan di Indonesia yang sudah mengakar sejak kuat dalam bentuk Ujian Nasional dengan penentuan kelulusan yang ditentukan dari beberapa mata Pelajaran saja. Sebagai upaya mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil bukan mengevaluasi capaian peserta didik yang sebelumnya digunakan dalam Ujian Nasional. Pelaksanaan kurikulum Merdeka khususnya pada penghapusan Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tentu saja menghasilkan respon dan pemikiran pro dan kontra khususnya dari perspektif guru. Ini menyimpulkan bahwa refleksi dan evaluasi akan terus diperlukan dalam pelaksanaannya. Hal-hal positif yang muncul dalam penghapusan Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dapat digunakan sebagai sebuah landasan dalam pelaksanaan salah satu bentuk pendidikan yang membebaskan atau memerdekakan menurut Freire. Setidaknya, siswa dan guru tidak merasa dituntut untuk menyelesaikan materi dalam waktu yang singkat. Kompetensi dan ekologi sekolah yang disesuaikan dalam melakukan penilaian dan keputusan kelulusan anak pada materi dan jenjang tertentu setidaknya memberikan keleluasaan pada guru dan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Penilaian yang tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitif saja dirasa lebih adil dan humanis dalam menentukan kelulusan anak pada suatu jenjang pendidikan mengingat setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda baik dalam tingkat afektif dan psikomotorik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barros, A., Bristow, A., Contu, A., Wanderley, S., & Prasad, A. (2024). Politicizing and humanizing management learning and education with Paulo Freire. *Https://Doi.Org/10.1177/13505076231221792*, 55(1), 3–16. <https://doi.org/10.1177/13505076231221792>
- Cooper, S., & Majumdar, D. G. (2023). (De)humanization in the business school: Critical reflection on doctoral experiences. *Https://Doi.Org/10.1177/13505076231198491*, 55(1), 81–103. <https://doi.org/10.1177/13505076231198491>
- Dharma, E., Betty Sihombing STIE Sultan Agung, H., & Sultan Agung, S. (2021). MERDEKA BELAJAR: KAJIAN LITERATUR. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190. <https://proceeding.urbangreen.co.id/index.php/library/article/view/33>
- Echa Safitri, R., Rahim, A., Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Jl Mataram No, I., Miuwo, K., Kaliwates, K., Jember, K., & Timur, J. (2024). Implementasi P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) Pada Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(2), 616–624. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n2.p616-624>
- Fauziati, E., Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Yang Membebaskan Paulo Freire, M., & Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Yang Membebaskan Paulo Freire. (2022). Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan yang Membebaskan Paulo Freire. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 2036–2048. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I3.6473>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. The Continuum International Publishing Group Inc.
- Freire, P. (1974). *Education for Critical Consciousness*. Continuum.
- Freire, P. (2007). *Politik pendidikan : kebudayaan, kekuasaan dan pembebasan*. Pustaka Pelajar.

- GTK Kemendikbud | 2023. (n.d.). Retrieved October 31, 2024, from <https://gtk.kemdikbud.go.id/category/artikel>
- Hasanah, M., Pesantren, I., Abdul, K., Pacet, C., Indonesia, M., Fahad, T., & Hakim, L. (2021a). Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(3), 252–260. <https://doi.org/10.54437/IRSYADUNA.V1I3.344>
- Hasanah, M., Pesantren, I., Abdul, K., Pacet, C., Indonesia, M., Fahad, T., & Hakim, L. (2021b). Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(3), 252–260. <https://doi.org/10.54437/IRSYADUNA.V1I3.344>
- Indahri, Y. (2020). *Jurnal Elementary Telaah Sistem Pendidikan Di Finlandia : Penerapan Sistem Pendidikan Terbaik Di Dunia Jenjang Sekolah Dasar*. 3(2). <https://doi.org/10.31764/ELEMENTARY.V3I2.2136>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. (n.d.-a). Retrieved October 31, 2024, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/tahun-2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. (n.d.-b). Retrieved November 1, 2024, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/empat-aspek-prioritas-dalam-gerakan-merdeka-belajar-menginspirasi-negeranegara-di-asean>
- Marmoah, S., Roslan, R., Chaeroh, M., Elita, M. D., & Fauziah, M. (2021). The Comparison of Education System in Australia and Indonesia. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 784–796. <https://doi.org/10.23887/JPI-UNDIKSHA.V10I4.33661>
- Misoczky, M. C. (2023). Paulo Freire and the praxis of liberation: Education, organization and ethics. *Https://Doi.Org/10.1177/13505076231201734*, 55(1), 124–140. <https://doi.org/10.1177/13505076231201734>
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/JISIP.V5I1.1568>
- Patimah, P., Fadia, L., & Syamsi, A. (2023). Problem Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum Di Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 4(2), 97–110.
- Putika, V., 1*, S., & Sayekti, I. C. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada Kompetensi Dasar Literasi Membaca Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5237–5243. <https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V6I3.2907>
- Putra, A. I. P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 226–236. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/10065>
- Rohim, D. C. (2021). Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal VARIDIKA*, 33(1), 54–62. <https://doi.org/10.23917/VARIDIKA.V33I1.14993>
- Sari, A., Daulay, S., Putri, Y. Y., & Epriani, P. (2021). *Penghapusan Ujian Nasional Tahun 2021 Dalam Perspektif Guru SMA Di Kota Tebing Tinggi*.
- Siahaan, A., Akmalia, R., Amelia, L., Ardhi, A., Sitorus, M., Siraj, M. S., Ardiansyah, Y., Negeri, U. I., Utara, S., William, J., Ps, I. V., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, D. (2023). Mengelola dan Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Journal on Education*, 5(3), 5815–5825. <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I3.1344>
- Syaikhudin, A. (2012). Konsep Pemikiran Pendidikan Menurut Paulo Freire Dan Ki Hajar Dewantoro. *Cendekia*, 10(1).
- Teresia, W. (2021). *Asesmen Nasional 2021* (W. Teresia, Ed.). Guepedia.
- Üstün, U., & Eryılmaz, A. (2018). *Analysis of Finnish Education System to question the reasons behind Finnish success in PISA*. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/84227>